

TESIS
KEKUATAN HUKUM AKTA WASIAT ATAS HARTA YANG
DIPEROLEH PEWARIS BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2685K/Pdt/2020)

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh :

DEVI DIANY

NIM. 2420123013

Dosen Pembimbing :

PROF. DR. BUSYRA AZHERI, SH., M.HUM

DR. DEVIANTY FITRI, SH., M.HUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM AKTA WASIAT ATAS HARTA YANG DIPEROLEH PEWARIS BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2685K/PDT/2020)

Devi Diany, 2420123013, 157 halaman, Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2026

Kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai suatu hal yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, salah satunya mengenai pembuatan akta wasiat (testament). Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pihak-pihak yang menandatangani serta ahli waris, selama tidak dibuktikan sebaliknya. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPdata, proses pembuktian secara tertulis dapat dilakukan dengan adanya tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan. Artinya, jika terjadi perselisihan di kemudian hari, akta wasiat dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam kasus yang diteliti, ahli waris merasa hak mutlaknya (legitime portie) dilanggar dengan adanya akta wasiat yang dibuat pewaris di hadapan Notaris, sehingga ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang. Putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan Notaris melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi putusan tingkat banding dan kasasi menyatakan Notaris tidak melanggar hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan. Permasalahan dalam Tesis ini adalah: 1) Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2685-K/Pdt/2020 tentang kekuatan hukum akta wasiat atas harta warisan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama? 2) Bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 2685-K/Pdt/2020 terhadap ahli waris dan praktik pembuatan akta oleh notaris? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach) dan bersifat deskriptif. Teknik dokumentasi bahan hukum menggunakan bahan sekunder yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif, tidak menggunakan uji statistik tetapi diuji dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan dilakukan analisis. Hasil penelitiannya, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2685-K/Pdt/2020 yang menyatakan putusan judex facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dalam hal ini Notaris tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat Akta Wasiat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena pewaris dan juga Notaris sudah mengikuti prosedur pembuatan akta yang benar menurut ketentuan undang-undang.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akta Wasiat, Pewaris, Ahli Waris, Kesepakatan.

ABSTRACT

THE LEGAL FORCE OF A TESTAMENTARY DEED REGARDING ASSETS ACQUIRED BY THE TESTATOR BASED ON A MUTUAL AGREEMENT (A STUDY OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DECISION NO. 2685K/PDT/2020)

Devi Diany, 2420123013, 157 pages, Master's Study Program in Notarial Law
Law Faculty, University of Andalas, 2026

The authority of a notary is to make authentic deeds regarding a matter desired by the interested party, one of which is regarding the making of a will (testament). Authentic deeds made before a notary have perfect evidentiary power and bind the parties who signed it and the heirs, as long as there is no evidence to the contrary. Based on Article 1867 of the Civil Code, the written proof process can be carried out with an authentic writing or a private writing. This means that if a dispute arises in the future, the will deed can be used as evidence in court. In the case studied, the heirs felt that their absolute rights (legitime portie) were violated by the will deed made by the testator before a notary and therefore filed a lawsuit with the Padang District Court. The first instance court ruling stated that the Notary had committed an unlawful act. However, the appeal and cassation rulings stated that the Notary had not violated the law and the first instance court ruling was annulled. The problems in this thesis are: 1) How is the analysis of the judge's legal considerations in the Supreme Court of the Republic of Indonesia ruling Number 2685-K/Pdt/2020 concerning the legal force of will deeds over inheritance assets obtained based on mutual agreement? 2) What are the legal implications of the Supreme Court ruling Number 2685-K/Pdt/2020 for heirs and the practice of making deeds by notaries? This research is categorized as descriptive normative legal research or doctrinal legal research with a case approach. The legal documentation technique uses secondary data obtained through library research. The legal analysis technique uses qualitative analysis, but instead of statistical testing, it analyses and tests against laws, regulations, and expert opinions. The result of this research is that the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2685-K/Pdt/2020, which stated that the *judex facti* decision did not conflict with the law and/or statutes, revealed that in this case, the Notary did not commit an unlawful act in making the Deed of Will as argued by the Plaintiff in his lawsuit, because the heir and also the Notary had followed the correct procedure for making the deed according to the provisions of the law.

Keywords: Legal Strength, Deed of Will, Heir, Heirs, Agreement.